

# EVALUASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

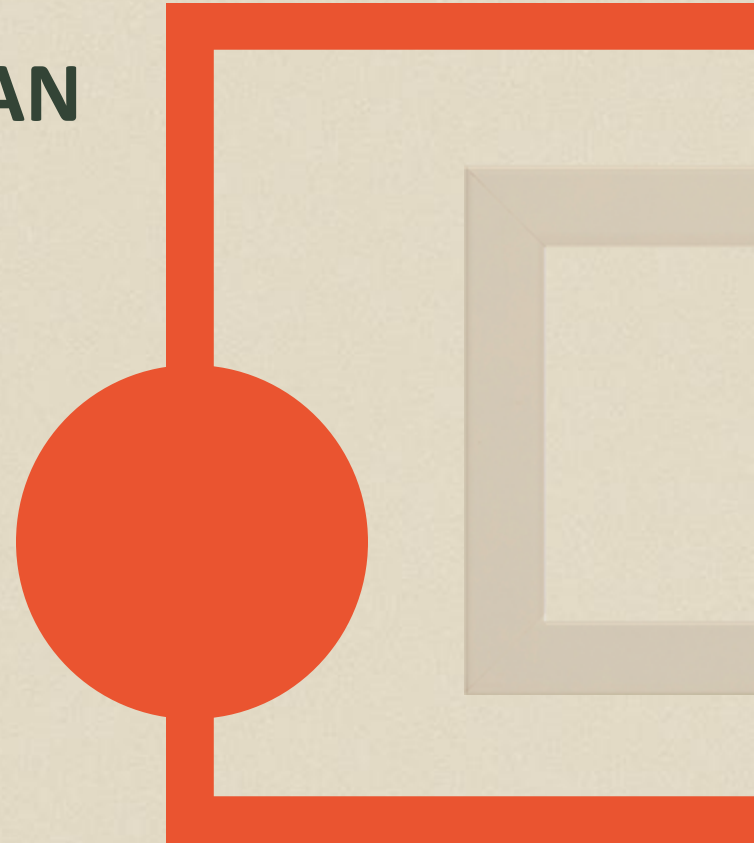
Oleh Kelompok 5:

Rina Hapsari (1811001004)

Irfan Bastian (1811001007)

Sibti Ilahi (1811001019)

Rizky Melliana Devi (1811001024)

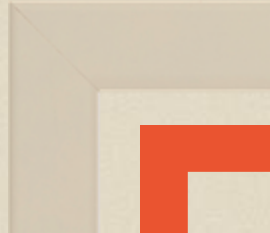




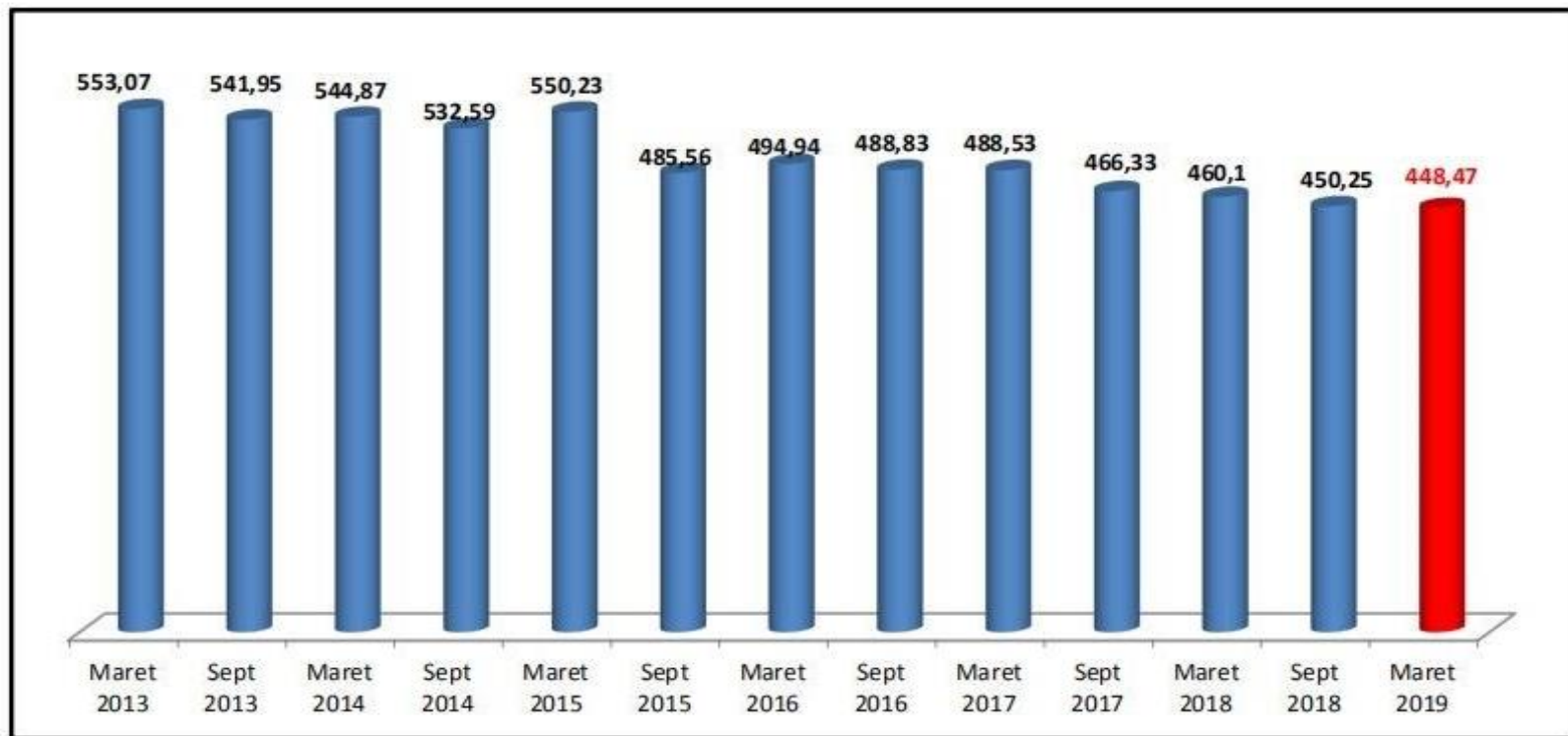
## Intermezzo

Isu kemiskinan merupakan masalah kemanusiaan yang memprihatinkan, sebagian orang merasakan dampak yang ditimbulkan dari kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Namun, persoalan kemiskinan bukan hanya terkait dengan masalah ekonomi, namun juga terkait dengan bidang lain yang sifatnya multidimensi.

Kemiskinan di Indonesia masih menjadi masalah yang belum bisa di atasi salah satunya Provinsi D.I. Yogyakarta, hingga saat ini kemiskinan di D.I. Yogyakarta belum menunjukkan perubahan yang baik. Oleh karena itu kemiskinan masih menjadi tanggung jawab pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah.



## Jumlah Penduduk Miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta Maret 2013 - Maret 2019 (dalam ribuan orang)



Sumber : BPS, Susenas Maret 2013 - Maret 2019

**Tabel 1.**  
**Garis Kemiskinan Menurut Tipe Daerah**  
**September 2019 - September 2020**

Daerah/Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)		
	Makanan	Bukan Makanan	Total
<b><i>Perkotaan</i></b>			
September 2019	338.723	133.943	472.666
Maret 2020	350.055	137.118	487.173
September 2020	350.253	138.208	488.461
<b><i>Perdesaan</i></b>			
September 2019	286.565	106.183	392.748
Maret 2020	296.144	107.028	403.173
September 2020	296.654	107.382	404.035
<b><i>Kota+Desa</i></b>			
September 2019	322.999	126.486	449.485
Maret 2020	334.461	129.019	463.479
September 2020	335.262	130.166	465.428

Sumber : BPS, Susenas September 2019, Maret 2020, September 2020

# Penyebab Terjadinya Kemiskinan di DIY

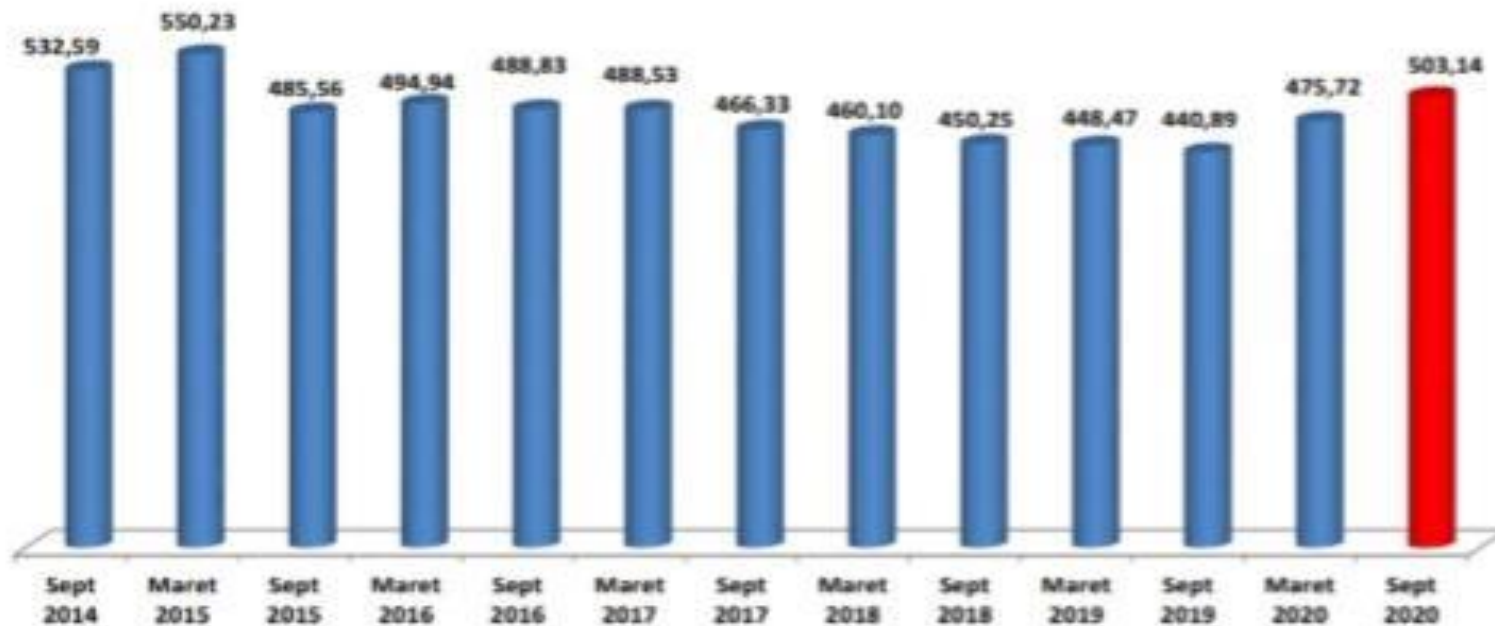
- Komoditas makanan yang masih memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam penentuan garis kemiskinan. Garis kemiskinan makanan tercatat sebesar 335.262 rupiah per kapita per bulan dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar 130.166 rupiah per kapita per bulan. Laju peningkatan garis kemiskinan non makanan dibandingkan dengan garis kemiskinan makanan sejalan dengan laju inflasi D.I. Yogyakarta. Pada September 2020, laju inflasi tercatat sebesar 0,03 persen dimana komoditi makanan, minuman dan tembakau justru mengalami deflasi sebesar 0,24 persen. Sementara itu, komoditi transportasi; kesehatan; dan perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rumah tangga mengalami inflasi (BRS DIY, No. 58/10/34/Thn.XXII).
- Untuk komoditi non makanan, ada lima komoditas yang mempunyai andil terbesar dalam pembentukan garis kemiskinan di perkotaan yaitu perumahan, bensin, pendidikan, listrik, dan perlengkapan mandi. Sementara itu, lima komoditas non makanan utama pembentuk garis kemiskinan di perdesaan adalah perumahan, bensin, perlengkapan mandi, air, dan kesehatan.

# Lanjutan

- Adanya peningkatan pertumbuhan rasio harga beras dan harga dasar gabah (GKG), sehingga juga meningkatkan pertumbuhan jumlah penduduk miskin DIY. Baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang pertumbuhan jumlah penduduk miskin DIY terhadap pertumbuhan rasio harga beras dan harga dasar gabah akan bersifat inelastis yang artinya walaupun harga beras maupun harga gabah tersebut naik dan itu merupakan kebutuhan pokok maka konsumen atau masyarakat akan tetap membutuhkannya.
- Kondisi penduduk miskin dari sisi sosial ekonomi sangat sulit untuk keluar dari kemiskinan yang sebagian besar tidak mempunyai pekerjaan dan tidak mampu melakukan kegiatan usaha produktif karena ketiadaan modal dan potensi SDA DI Yogyakarta yang minim sangat mempengaruhi upaya untuk melakukan distribusi pendapatan ke masyarakat serta keterbatasan dana anggaran APBD juga mempengaruhi upaya percepatan kesejahteraan masyarakat di DIY.

# Perkembangan Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta

Gambar 1.  
Jumlah Penduduk Miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta  
September 2014 - September 2020 (dalam ribuan orang)



Sumber : BPS, Susenas September 2014 - September 2020

# Kualitas Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta

Dalam kurun waktu satu tahun terakhir nilai indeks P1 D.I. Yogyakarta menunjukkan Kecenderungan yang meningkat. Pada September 2019, indeks P1 tercatat sebesar 1,545. Selanjutnya, pada Maret 2020, indeks P1 meningkat menjadi 1,939. Kemudian, pada September 2020, indeks P1 kembali mengalami peningkatan menjadi 2,079. Meningkatnya indeks P1 Memberikan gambaran bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin jauh dari garis Kemiskinan.







Sejalan dengan indeks P1, indeks P2 juga menunjukkan adanya kecenderungan yang Meningkat pada rentang waktu yang sama. Pada September 2019, nilai indeks P2 adalah 0,301. Satu semester kemudian, pada Maret 2020, indeks P2 mengalami peningkatan menjadi 0,456. Selanjutnya, sejalan dengan bertambahnya penduduk miskin dan meningkatnya keparahan Kemiskinan, indeks P2 pada September 2020 kembali meningkat menjadi 0,499. Situasi ini menunjukkan meningkatnya kesenjangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

# Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Menurut TKKP (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan) ada empat strategi yang dikembangkan yaitu :

- Pertama, mengurangi beban masyarakat miskin melalui bantuan Jaminan Kesehatan daerah (Jamkesda), Jaminan Pendidikan Daerah (JPD) dan Biaya Operasional Sekolah (BOS).
- Kedua, meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin melalui beberapa pelatihan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi.
- Ketiga, mengembangkan dan menjamin keberlanjutan UMKM melalui pembinaan yang dilakukan Diperindagkoptan.
- Keempat, melalui sinergi kebijakan dan program secara bersama dengan semua unsur lapisan masyarakat.

# Strategi Penanggulangan Kemiskinan di DIY

Strategi yang dilakukan dan di upayakan oleh pemerintah DIY meliputi :

## **1). Strategi Peningkatan Akses Penduduk Miskin Pada Sektor-Sektor Pendidikan, Kesehatan, Keuangan, Dan Infrastruktur**

Ada beberapa program yang dapat dirumuskan, yaitu : Penyediaan dan perbaikan layanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan, Wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun, Peningkatan akses pendidikan dasar, menengah, dan tinggi bagi penduduk miskin, Peningkatan gizi dan kesehatan keluarga, Pencegahan dan penanggulangan penyakit, Pemberdayaan lembaga ekonomi dan keuangan mikro, penyediaan dan perbaikan perumahan dan lingkungan perumahan termasuk air bersih dan lainnya.

# Lanjutan

Strategi yang dilakukan dan di upayakan oleh pemerintah DIY meliputi :

## **2). Strategi Peningkatan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi**

Ada beberapa program yang dapat dirumuskan terkait dengan strategi peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi, yaitu: peningkatan produktivitas sektor pertanian dan perlindungan lahan; pengendalian sektor perdagangan, hotel, dan restoran agar lebih berpihak pada usaha penanggulangan kemiskinan; pengendalian harga bahan pokok; perluasan jaringan pelayanan dalam penyediaan kebutuhan pokok dengan melibatkan swasta dan dunia usaha; pembangunan berbasis pedesaan.

## Lanjutan ...

Adapun strategi lainnya yang menjadi prioritas pemerintah DIY, yaitu salah satu strategi yang kemudian dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta dalam upaya menanggulangi kemiskinan adalah dengan gerakan Gandeng Gendong. Gandeng Gendong resmi menjadi program Pemkot Yogyakarta sejak 2018. Gandeng Gendong merupakan kelanjutan dari visi Segoro Amarto Pemerintah Kota Yogyakarta yang diluncurkan pada 2010. Program tersebut merupakan tindakan konkret dari smart city dan smart society. Dalam program ini ada inovasi, yang menurut Heroe Poerwadi, ditujukan untuk mengoptimalkan potensi kearifan lokal sebagai upaya percepatan pengentasan kemiskinan. Dalam konsep Gandeng Gendong bisa diterapkan di seluruh aspek pembangunan mulai dari pembangunan di bidang ekonomi, pengentasan kemiskinan, hingga pemberdayaan pelaku usaha kecil dan mikro.

## Evaluasi Program/Strategi

Program Gandeng Gendong dapat dikatakan belum maksimal dalam pelaksanaannya terutama tentang sosialisasi, pemberdayaan dan pelatihan. Sehingga Program Gandeng Gendong dalam upaya menurunkan angka kemiskinan di Kota Yogyakarta tidak banyak memberi dampak yang signifikan terhadap jumlah kemiskinan. Hal tersebut karena pelaksanaan program Gandeng Gendong belum maksimal dalam sosialisasi, pemberdayaan dan pelatihan kepada masyarakat. Evaluasi terhadap program pengentasan kemiskinan di Yogyakarta menghasilkan pengetahuan bahwa berbagai program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah kurang berhasil, hal itu disebabkan kurangnya sinergi pemerintah dan partisipasi masyarakat.



**-THANK YOU-**

Any question?